

Pemerintahan Daerah

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Individu

Mata Kuliah:

Hukum Tata Negara

Dosen Pengampu:

Dr. Eko Hidayat S.Sos, Mh



Disusun Oleh:

Kelompok 7

Endasti Ambeq Vhara Martha

2221020061

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga makalah yang berjudul “Pemerintah Daerah” ini dapat tersusun hingga selesai. Dengan selesainya makalah ini, kami sebagai penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak yang telah membantu proses penyusunan makalah ini.

Dengan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, untuk kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami. Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini.

Bandar Lampung, 18 Maret 2024

Kelompok 7

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Rumusan Masalah	5
BAB II ISI	6
2.1. Bagian Pemerintahan Daerah.....	6
A. Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi)	6
B. Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)	6
C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).....	7
D. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	8
E. Dinas-Dinas Daerah.....	8
F. Kecamatan.....	9
2.2. Tata Pelaksanaan Pemerintahan Daerah	10
2.3. Pemerintahan yang Baik.....	12
2.4. Teori Pelaksanaan	13
2.5. Tata Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik.....	14
2.6. Bentuk Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik	20
BAB III PENUTUP	24
3.1. Kesimpulan.....	24
3.2. Saran	25
DAFTAR PUSTAKA.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tata pemerintahan yang efektif (good governance) adalah hal yang penting dalam merencanakan strategi pembangunan. Ini mencakup peran pemerintah dalam mengelola perkembangan daerah dan menjadi indikator kunci dalam siklus pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat. Good governance mengusung prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, dengan tujuan utama mencapai kemakmuran dan kemajuan rakyat serta negara.

Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa negara ini adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi (otonomi), di mana pemerintah daerah memiliki tugas-tugas tertentu yang harus mereka atasi sendiri, meskipun pemerintah pusat memegang kedaulatan tertinggi. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah memiliki empat dimensi penting, yaitu kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan, yang memerlukan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan lokal.¹

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU), peran pemerintah daerah sangat strategis, terutama dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kemudian Undang-

¹ Andryan, 2019. "*Harmonisasi Pemerintah Pusat Dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan*". Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 4 - Desember 2019, hlm. 420-421

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengubah sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi (otonomi daerah).

Perjalanan pemerintahan daerah di Indonesia selalu berubah sesuai dengan perubahan politik dan hukum negara. Ini meliputi masa orde lama, orde baru, dan saat ini, orde reformasi. Perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah memengaruhi implementasi otonomi daerah yang lebih memperhatikan hubungan antara pusat dan daerah, keanekaragaman daerah, serta tantangan global dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.²

Mewujudkan good governance merupakan bagian yang sangat penting dari tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya. Namun, hal ini dapat menjadi sulit dilaksanakan jika para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak memiliki kesadaran akan kewajiban mereka untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik serta penuh tanggung jawab. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, seorang PNS sekarang dinilai berdasarkan kompetensi, kualitas, dan kinerjanya dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, integritas dan tanggung jawab dalam melayani publik, baik itu publik internal maupun eksternal, juga menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh seorang PNS. Karena kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik ditentukan oleh seberapa baik PNS sebagai aparatur Pemerintah Daerah dalam melayani publiknya.³

² Sri Kusriyah, 2016. "Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia". Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 1 Januari- April 2016, hlm. 2

³ <https://diskominfo.bantenprov.go.id/post/good-mindset-ciptakan-good-governance>

Dalam karya ilmiah yang akan dibahas, perlu ditekankan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam implementasi good governance dalam perspektif hukum kepegawaian sangatlah vital. Hal ini mencakup aspek penilaian kinerja, peningkatan kompetensi, pembinaan integritas, serta pengawasan terhadap ASN agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, penting juga untuk mendiskusikan peran pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi ASN agar dapat berperan maksimal dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep tata pemerintahan yang efektif (good governance)?
2. Apa saja bentuk dukungan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance)?

BAB II

ISI

2.1. Bagian Pemerintahan Daerah

A. Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi)

Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) di Indonesia memiliki struktur yang terdiri dari Gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola berbagai aspek pemerintahan di tingkat provinsi. Gubernur bertanggung jawab atas kebijakan dan program-program pembangunan serta pelayanan publik di wilayah provinsi tersebut. Mendampingi Gubernur, terdapat Wakil Gubernur yang bertugas membantu dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan provinsi bersama-sama dengan Gubernur. Di samping itu, terdapat Sekretariat Daerah Provinsi yang memiliki fungsi penting dalam koordinasi dan administrasi di tingkat provinsi. Sekretariat Daerah Provinsi bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi pemerintahan provinsi, mulai dari pengelolaan data, penyiapan dokumen, hingga koordinasi antarunit kerja di lingkungan pemerintahan provinsi. Dengan demikian, struktur pemerintah daerah tingkat I ini berperan penting dalam memastikan berjalannya roda pemerintahan provinsi dengan efektif dan efisien.

B. Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)

Dalam pemerintahan daerah, struktur dan fungsi Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) memiliki peran yang krusial dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan pembangunan di tingkat yang lebih lokal. Bupati/Walikota menjadi figur utama sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola berbagai aspek pemerintahan, termasuk

pembangunan, keamanan, dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Mendampingi Bupati/Walikota, terdapat Wakil Bupati/Wakil Walikota yang turut bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta membantu Bupati/Walikota dalam pengambilan keputusan strategis. Sementara itu, Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota memiliki peran vital dalam menjaga koordinasi dan administrasi di tingkat kabupaten/kota. Tugasnya meliputi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan data, koordinasi antarunit kerja, serta penyiapan dokumen-dokumen penting terkait kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya struktur dan fungsi yang terorganisir dengan baik, Pemerintah Daerah Tingkat II mampu menjalankan perannya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat di tingkat lokal.

C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang sangat penting dalam pemerintahan daerah. Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewakili suara dan kepentingan masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Mereka tidak hanya bertugas sebagai perwakilan, tetapi juga memiliki peran dalam membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur berbagai aspek kehidupan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Pada tingkat kepemimpinan, DPRD dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris DPRD yang bertugas memimpin jalannya kegiatan legislatif di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab dalam memastikan proses pembuatan keputusan berjalan efisien, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mereka wakili. Dengan adanya DPRD yang kuat dan efektif, pemerintahan

daerah dapat lebih responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta mampu menghasilkan kebijakan yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal.

D. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memegang peran penting dalam pemerintahan daerah dengan tugas utama merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. BAPPEDA bertanggung jawab untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan panjang yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah. Selain itu, BAPPEDA juga berperan dalam mengkoordinasikan berbagai program pembangunan antarunit kerja di pemerintahan daerah serta dengan pihak terkait lainnya seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dengan peran yang strategis ini, BAPPEDA menjadi salah satu motor penggerak dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan berdaya guna bagi masyarakat di tingkat daerah.

E. Dinas-Dinas Daerah

Dinas-Dinas Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan berbagai urusan dan kegiatan yang bersifat khusus di tingkat daerah. Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas semua hal terkait urusan pendidikan di daerah, termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan mutu pendidikan, dan pengelolaan sekolah-sekolah. Sementara itu, Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas urusan kesehatan masyarakat di daerah, mulai dari pelayanan kesehatan dasar hingga pengendalian penyakit menular. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertugas dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan di daerah,

seperti jalan raya, jembatan, dan hunian masyarakat. Dinas Sosial bertanggung jawab atas urusan sosial dan kesejahteraan masyarakat, termasuk penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, terdapat juga Dinas Pendapatan yang mengelola pendapatan daerah dan pajak serta Dinas Pariwisata yang bertugas mengembangkan sektor pariwisata di daerah. Berbagai dinas lainnya juga hadir sesuai dengan kebutuhan spesifik dan karakteristik daerah untuk memastikan berjalannya pemerintahan daerah dengan efektif dan efisien.

F. Kecamatan

Kecamatan merupakan unit administratif penting dalam pemerintahan daerah yang terdiri dari beberapa komponen utama. Camat, sebagai kepala pemerintahan di tingkat kecamatan, memegang tanggung jawab besar atas urusan pemerintahan di kecamatan tersebut. Mereka bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan program di kecamatan serta menjadi perwakilan pemerintah daerah di tingkat kecamatan. Selain itu, terdapat Sekretariat Kecamatan yang memiliki peran penting dalam mengelola administrasi dan koordinasi di tingkat kecamatan, memastikan berjalannya berbagai kegiatan pemerintahan dengan efisien. Kelurahan/Desa juga merupakan bagian integral dari kecamatan, sebagai unit pemerintahan terkecil yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di tingkat desa/kelurahan. Mereka memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan administrasi desa, penyelenggaraan pelayanan publik, serta pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dengan adanya struktur yang terorganisir dengan baik di tingkat kecamatan,

pemerintahan daerah dapat lebih responsif dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat lokal.⁴

2.2. Tata Pelaksanaan Pemerintahan Daerah

Tata Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) mencakup beberapa aspek kunci yang mengatur jalannya pemerintahan di tingkat provinsi. Gubernur memegang peran sentral sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program-program provinsi. Mereka dibantu oleh Wakil Gubernur dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Sementara itu, Sekretariat Daerah Provinsi memiliki peran vital dalam mengoordinasikan unit kerja di provinsi dan menyediakan dukungan administratif bagi Gubernur dan Wakil Gubernur. Di sisi legislatif, DPRD Provinsi berperan dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah provinsi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) juga turut serta dalam merencanakan dan mengoordinasikan program pembangunan di tingkat provinsi, menjaga kesinambungan rencana pembangunan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tata Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) memiliki dinamika yang serupa namun lebih terfokus pada tingkat kabupaten/kota. Bupati/Walikota memimpin pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan di tingkat lokal, didukung oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota memainkan peran penting dalam mengoordinasikan unit kerja di tingkat lokal dan memberikan dukungan administrasi bagi kepala daerah dan wakilnya. DPRD

⁴ <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/19/120000569/struktur-pemerintah-daerah>

Kabupaten/Kota bertugas membuat Perda serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten/kota. Sama seperti di tingkat provinsi, BAPPEDA di tingkat kabupaten/kota juga berperan dalam merencanakan dan mengkoordinasikan program pembangunan lokal.

Tata Pelaksanaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan aspek penting dalam sistem pemerintahan daerah. Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki tugas membahas rancangan Perda dan melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Pimpinan DPRD memimpin jalannya sidang-sidang DPRD dan mengkoordinasikan kegiatan legislatif di tingkat daerah. Komisi-komisi DPRD, jika ada, berperan dalam membahas dan memberikan rekomendasi terkait dengan berbagai bidang kebijakan di tingkat daerah, memastikan bahwa kepentingan masyarakat terwakili dan diwujudkan dalam kebijakan yang dihasilkan.

Tata Pelaksanaan Dinas-Dinas Daerah mencakup bidang-bidang spesifik seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, pendapatan, pariwisata, dan lain sebagainya. Setiap dinas memiliki tanggung jawab atas bidang urusan tertentu dan bertugas merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi kegiatan dan program di bidangnya sesuai dengan arahan dari kepala daerah dan peraturan yang berlaku.

Tata Pelaksanaan Kecamatan dan Kelurahan/Desa terfokus pada tingkat paling dekat dengan masyarakat. Camat/Kepala Desa/Kepala Kelurahan memimpin pelaksanaan kebijakan di tingkat kecamatan, desa, atau kelurahan, sementara unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan, desa, atau kelurahan bertugas memfasilitasi pelaksanaan program pemerintah di tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat. Kegiatan pelayanan publik dan pembangunan dilakukan oleh instansi-instansi terkait di tingkat tersebut sesuai

dengan tugas dan tanggung jawabnya, memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi secara efektif dan efisien.⁵

2.3. Pemerintahan yang Baik

Good governance dapat disederhanakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur pemerintahan untuk memastikan layanan publik yang efisien, sistem peradilan yang dapat diandalkan, dan administrasi yang bertanggung jawab kepada publik.⁶ Ini melibatkan kesepakatan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pembentukan mekanisme, proses, dan lembaga yang memungkinkan warga dan kelompok masyarakat untuk menyuarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menyelesaikan perbedaan di antara mereka. Selain itu, good governance juga mencakup penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, efektif, dan efisien dengan memastikan interaksi yang konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.⁷

Secara umum, konsep good governance mencakup segala aspek yang terkait dengan upaya mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mencapai nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini tidak hanya terbatas pada pengelolaan lembaga pemerintahan, tetapi juga melibatkan semua lembaga baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah (masyarakat dan sektor bisnis/pasar). Good governance, yang juga dikenal sebagai tata pemerintahan, merupakan penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola urusan negara pada semua

⁵ Nunung Munawaroh, 2019, “*PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK òGOOD GOVERNANCEÒDI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS*”, Hlm. 143-156

⁶ Mas oed, Mohtar, 2008. “*Politik, Birokrasi dan Pembangunan*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.150-151

⁷ Sandy Ramadhan, 2019. “*Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Mewujudkan GoodGovernance Di Kantor Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara*”, eJournalIlmu Pemerintahan, Volume 7, Nomor 3, 2019: hlm. 1238-1239

tingkat. Ini melibatkan mekanisme, proses, dan lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat dapat mengemukakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menyelesaikan perbedaan di antara mereka.⁸

Dalam konteks pengembangan pembangunan yang solid, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, good governance juga mencakup upaya untuk menghindari alokasi dan investasi yang salah, mencegah korupsi baik secara politik maupun administratif, menerapkan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka kerja hukum dan politik yang mendukung pertumbuhan usaha. Dengan demikian, good governance dapat dianggap sebagai bentuk tata pemerintahan yang baik dan bersih.

2.4. Teori Pelaksanaan

Implementasi merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan atau program. Tindakan ini bertujuan untuk mengubah keputusan tersebut menjadi pola operasional yang dapat direalisasikan, baik dalam skala besar maupun kecil sesuai dengan keputusan sebelumnya. Implementasi juga mencakup pemahaman terhadap apa yang seharusnya terjadi setelah program atau kebijakan dilaksanakan.⁹ Menurut Gordon, implementasi terkait dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu program, sementara menurut teori Jones, implementasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk menjalankan program hingga mencapai hasilnya, dan menurut Horn dan Meter, implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik dari

⁸ Sedarmayanti. 2003. *"Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah"*. Mandar Maju: Bandung. hlm. 15

⁹ Mulyadi, Deddy, 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta, hlm. 12

sektor publik maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya.

Selain itu, implementasi juga dapat dipandang sebagai proses umum dari tindakan administratif yang dapat diamati pada tingkat program tertentu, seperti yang diungkapkan oleh Grindle. Horn mendefinisikan implementasi sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan.¹⁰ Selanjutnya, Salusu menyebutkan bahwa implementasi merupakan operasionalisasi dari berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu dan melibatkan semua tingkatan manajemen dari puncak hingga tingkat karyawan terbawah. Ekawati menambahkan bahwa implementasi mencakup tindakan individu atau kelompok baik dari sektor swasta maupun publik yang langsung terlibat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Jadi, implementasi adalah serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menjalankan program atau kebijakan hingga mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan arah yang telah direncanakan.¹¹

2.5. Tata Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik

Posisi birokrasi dan aparturnya dalam hubungan dengan pemerintah dan masyarakat memiliki peran krusial. Aparatur Sipil Negara (ASN) sering menjadi pusat perhatian sebagai penggerak utama pelayanan publik.¹² Karena itu, ASN harus memberikan layanan yang profesional, patuh pada aturan, dan menjaga integritasnya.

¹⁰ Arifin Tahir, 2014, *"Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah"*, Bandung, Alfabeta, hlm. 55

¹¹ Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. *"Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa"*. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2, hlm. 136

¹² Tulus Santoso dan Maya Puspita Dewi, 2019. *"Etika Aparatur Sipil Negara dalam Membangun Good Governance"*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 2 , No. 2, Desember 2019, hlm. 179

Setiap keluaran yang tidak sesuai dari ASN pasti akan mendapat respons dari masyarakat. Sebagai bagian dari administrasi publik, ASN diharapkan untuk mematuhi etika yang mendasari perilakunya, mencegah diskriminasi dalam layanan, menghindari korupsi, dan memastikan efektivitas layanan publik. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Setiap ASN harus memiliki jiwa korps dan mengikuti kode etik yang telah ditetapkan pemerintah. Jiwa korps menekankan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan, dan rasa memiliki organisasi ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, kode etik mengatur sikap, perilaku, dan tindakan ASN dalam menjalankan tugasnya dan interaksi sehari-hari. Pembinaan jiwa korps ASN bertujuan meningkatkan loyalitas, dedikasi, dan kualitas pelayanan ASN sesuai dengan nilai-nilai dasar negara.

Proses seleksi calon Pegawai Negeri Sipil menciptakan budaya kerja yang mencerminkan karakteristik ASN, termasuk janji kesetiaan, transparansi kekayaan, dan komitmen anti-korupsi. Calon ASN harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai untuk memberikan layanan publik yang berkualitas. Pelatihan dasar (Latsar) menjadi tahapan penting dalam pembentukan ASN yang memiliki sikap pengabdian, kompetensi, dan kualitas pelayanan yang efektif. Undang-undang juga mengatur pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas, semangat nasionalisme, dan profesionalisme ASN dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini memastikan bahwa ASN menjaga

standar moral, semangat nasionalisme, dan berfokus pada pelayanan publik yang bermutu.

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur mengenai peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam pasal 70 disebutkan bahwa setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan. Proses pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat nasionalisme dan kebangsaan, serta karakter yang unggul dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas administrasi publik. Selain itu, pendidikan dan pelatihan juga membantu ASN memahami sistem pemerintahan, bidang tugas, dan budaya kerja organisasi sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Pelatihan juga penting dalam membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika seorang Pegawai Negeri Sipil.¹³

Dalam konteks ini, lima aspek pelatihan yang umum dikenal sebagai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan sikap ASN. Akuntabilitas, meskipun sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab, sebenarnya memiliki konsep yang berbeda, di mana akuntabilitas lebih menekankan pada kewajiban pertanggungjawaban yang harus dipenuhi. Nilai-nilai publik yang mendasari perilaku ASN termasuk kemampuan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi konflik kepentingan, kesadaran untuk menghindari keterlibatan politik praktis, perlakuan yang

¹³ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

sama dan adil terhadap warga negara, serta konsistensi dalam perilaku sebagai penyelenggara pemerintahan.

Nasionalisme dalam konteks ASN adalah pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air, yang ditanamkan melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, etika publik menjadi cerminan dari standar perilaku dan tindakan yang mengarah pada kebijakan publik, dengan kode etik yang mengatur tingkah laku dalam kelompok khusus. Komitmen mutu mencakup efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kualitas penyelenggaraan pemerintah, sedangkan anti-korupsi diwujudkan melalui sembilan nilai yang meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

Berikut adalah paradigma nilai-nilai etika publik yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

1. Meneguhkan nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila.
2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 serta pemerintah yang sah.
3. Mengabdikan kepada Negara dan rakyat Indonesia.
4. Melaksanakan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
5. Mengambil keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang tidak diskriminatif.
7. Memelihara dan memajukan standar etika yang mulia.
8. Bertanggung jawab atas tindakan dan kinerjanya kepada publik.
9. Memiliki keterampilan dalam menjalankan kebijakan dan program pemerintah.

10. Memberikan layanan kepada publik dengan jujur, responsif, cepat, akurat, berguna, berhasil, dan santun.
11. Menjunjung tinggi kepemimpinan berkualitas tinggi.
12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.
13. Prioritas pada pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
14. Mendukung kesetaraan dalam pekerjaan.
15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai bagian dari sistem karir.

Kode etik dan perilaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, memiliki tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara. Kode etik tersebut mencakup hal-hal berikut:

1. Melakukan tugas dengan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas yang tinggi.
2. Menjalankan tugas dengan teliti dan disiplin.
3. Memberikan pelayanan dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Patuh terhadap perintah atasan atau pejabat yang berwenang, selama tidak bertentangan dengan hukum dan etika pemerintahan.
6. Menjaga kerahasiaan terkait kebijakan Negara.
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
8. Menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan tugas.
9. Memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada pihak yang memerlukan informasi terkait pekerjaan.

10. Tidak menyalahgunakan informasi internal Negara, tugas, status, kekuasaan, atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
11. Mematuhi nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan menjaga reputasi serta integritas ASN.
12. Patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disiplin pegawai ASN.

Pegawai Negeri Sipil harus memiliki kemampuan dan kualitas yang tinggi serta tingkat disiplin yang optimal. Hal ini tidak hanya terbatas pada keahlian dan keterampilan di bidangnya, tetapi juga melibatkan aspek kualitas diri secara menyeluruh, karena nilai individu dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental (KSA). Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur sanksi atau hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin dalam menjalankan tugasnya. Di lingkungan Pegawai Negeri Sipil, kepatuhan terhadap tata tertib dan kelancaran tugas kerja dijaga melalui keputusan peraturan disiplin yang mencakup kewajiban, larangan, dan konsekuensi pelanggaran.¹⁴

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa good governance dalam konteks hukum kepegawaian harus mampu menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dalam pelayanan publik, serta patuh terhadap aturan yang berlaku demi menjaga integritasnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

¹⁴ Moh.Faizal Salman, 2003, "*Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang – Undang*", Mandar Maju, Bandung, hlm. 23

2.6. Bentuk Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik

1. Kemandirian

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dengan bentuk republik di mana pemerintahannya terbagi secara administratif menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap tingkat administratif tersebut memiliki pemerintahan daerah yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah serta peraturan lainnya guna melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah merupakan hak yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di tengah tuntutan dan kompleksitas kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, pemekaran wilayah menjadi suatu langkah yang diambil untuk mencapai perubahan yang lebih baik dengan memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah otonom. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberdayakan masyarakat lokal dalam skala yang lebih besar.

2. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka (13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data terkait kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan otonomi daerah, serta aspek-aspek lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang baru terbentuk. Evaluasi ini dilakukan secara khusus untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan lain yang diterima oleh Pemerintah. Evaluasi ini dilaksanakan setiap tahun secara rutin guna memberikan gambaran yang transparan mengenai perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari waktu ke waktu.

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu laporan yang harus disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan amanat dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah dan wajib disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. LPPD akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi, dan objektivitas menjadi dasar dalam penyusunan data dan informasi yang terdapat dalam LPPD.

3. Pengawasan Kebijakan Daerah

Perda, sebagai bagian penting dari kebijakan daerah, memiliki signifikansi yang besar dalam menerapkan prinsip otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda dijelaskan sebagai peraturan hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Secara umum, ada tiga jenis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, yakni pengawasan umum, preventif, dan represif. Pengawasan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri serta Gubernur/Bupati/Walikota dalam peran mereka sebagai perwakilan Pemerintah di daerah terkait. Mereka berwenang untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap segala aspek terkait pemerintahan daerah, baik yang berkaitan dengan urusan rumah tangga daerah maupun urusan pembantuan. Gubernur juga memiliki kewenangan serupa terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota). Dalam konteks pengawasan umum ini, Pemerintah Daerah diharuskan memberikan keterangan yang diminta. Jika daerah menolak memberikan keterangan tersebut, Menteri Dalam Negeri atau Gubernur dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu, walaupun bentuk tindakan tersebut tidak dijelaskan secara rinci oleh Undang-Undang karena pengaturannya ditentukan oleh Menteri.¹⁵

Pengawasan preventif tercermin dalam persyaratan pengesahan Perda atau keputusan tertentu sebelum diberlakukan. Perda tidak dapat berlaku tanpa pengesahan tersebut. Menteri Dalam Negeri berwenang untuk mengesahkan kebijakan daerah Provinsi, sedangkan Gubernur sebagai perwakilan pusat berwenang mengesahkan kebijakan daerah Kabupaten/Kota.

Pengawasan represif, di sisi lain, melibatkan penangguhan atau pembatalan berlakunya Perda, termasuk Perda yang telah melewati proses pengawasan preventif. Tujuannya adalah untuk menghindari kemungkinan daerah tidak mematuhi kebijakan pusat, meskipun dalam kenyataannya hal tersebut jarang terjadi. Pejabat yang berwenang memiliki wewenang untuk membatalkan atau menangguhkan keberlakuan Perda dan/atau keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum

¹⁵ Enny Nurbaningsih, 2011. *"Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah Dalam Era Otonomi Luas"*. Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 1, Februari 2011, hlm. 73

atau peraturan perundang-undangan tingkat atasnya. Jika Gubernur tidak menjalankan kewenangannya, maka Menteri Dalam Negeri akan mengambil alih. Pembatalan Perda dan/atau keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan mengakibatkan batalnya semua akibat hukum dari ketentuan tersebut selama masih bisa dibatalkan.¹⁶

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 74-75

BAB III

PENUTUP

Dari analisis terhadap konsep tata pemerintahan yang efektif (good governance) dalam konteks hukum kepegawaian serta bentuk dukungan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa implementasi good governance memainkan peran kunci dalam memastikan keberhasilan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. Dalam konteks ini, terdapat beberapa kesimpulan dan saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan kinerja dan integritas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

3.1. Kesimpulan

1. Perda memiliki peran strategis dalam implementasi otonomi daerah. Pengertian yang jelas tentang Perda serta proses pembuatannya perlu dipahami secara mendalam oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.
2. Terdapat tiga jenis pengawasan dalam pemerintahan daerah, yakni pengawasan umum, preventif, dan represif, yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan daerah terkait. Setiap jenis pengawasan memiliki peran penting dalam menjaga kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan.
3. Dalam pengawasan dan pengesahan kebijakan daerah, terdapat keterlibatan langsung dari Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara pusat dan daerah dalam menjalankan pemerintahan.
4. Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan proses evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) menjadi instrumen penting

dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

3.2. Saran

1. Peningkatan pemahaman pada pihak terkait, termasuk DPRD, kepala daerah, dan instansi terkait, perlu meningkatkan pemahaman tentang Perda, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah melalui pelatihan dan sosialisasi yang efektif.
2. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan terciptanya pelayanan publik yang optimal.
3. Penting untuk mendorong penerapan prinsip transparansi dalam penyusunan LPPD dan proses EPPD agar masyarakat dapat memantau dengan jelas kinerja pemerintah daerah dan hasil evaluasinya.
4. Perlu terus mengembangkan sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat setempat.
5. Pemerintah di tingkat pusat dan daerah perlu menjaga keseimbangan antara pengawasan yang ketat dan memberikan ruang bagi kreativitas serta inovasi dalam menjalankan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andryan. (2019). Harmonisasi Pemerintah Pusat Dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 4 - Desember 2019, hlm. 420-421.
- Arifin Tahir. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah. Bandung: Alfabeta, hlm. 55.
- Enny Nurbaningsih. (2011). Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah Dalam Era Otonomi Luas. *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 1, Februari 2011, hlm. 73.
- Mas Oed, Mohtar. (2008). Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 150-151.
- Mulyadi, Deddy. (2015). Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta, hlm. 12.
- Moh. Faizal Salman. (2003). Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang. Mandar Maju, Bandung, hlm. 23.
- Nunung Munawaroh, 2019, “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK òGOOD GOVERNANCEôDI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS”, Hlm. 143-156.
- Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1996). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 514.
- Sandy Ramadhan. (2019). Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kantor Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai

Kartanegara. eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 7, Nomor 3, 2019: hlm. 1238-1239.

Sedarmayanti. (2003). Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah. Mandar Maju: Bandung, hlm. 15.

Sri Kusriyah. (2016). Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III, No. 1, Januari-April 2016, hlm. 2.

Taufik, Mhd. dan Isril. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2, hlm. 136.

Tulus Santoso dan Maya Puspita Dewi. (2019). Etika Aparatur Sipil Negara dalam Membangun Good Governance. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol. 2, No. 2, Desember 2019, hlm. 179.

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/19/120000569/struktur-pemerintah-daerah>